

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dalam suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pelayanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Apabila pemerintah telah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal maka pemerintah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajiban. Kinerja keuangan pemerintah juga daerah dapat dilihat dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah (Mardiasmo, 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara (Hendawati, Komarasakti, & Ansori, 2017).

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Pelaksanaan otonomi daerah juga akan mempengaruhi kepada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkaitan erat dengan pemberian kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusan daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, karena hal itu merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan di daerah.

Laporan keuangan sektor publik atau keuangan daerah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Laporan keuangan daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU

Nomor 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”(Mahmudi, 2016)

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal pemda untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal tersebut. Pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemda (sebagai *stakeholders*), baik secara langsung maupun tidak langsung (Abdul Halim, 2008).

Analisis dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Mahsun, 2016).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kota Kandungan sebagai ibukotanya, memiliki 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk sampai dengan 2018, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan ialah sebanyak 232.587 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 116.327 jiwa dan perempuan sebanyak 116.260 jiwa. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain :

1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll)
2. Kehutanan.
3. Perkebunan (sawit, karet dll)
4. Pertanian (padi, jagung dll)

5. Peternakan (ayam, sapi dll)

6. Perikanan sungai.

Disamping itu pola hidup masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang konsumtif menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sektor usaha jasa perdagangan khususnya rumah makan dan warung makan, sehingga dengan potensi alam dan pola hidup masyarakat ini merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, dalam pengelolaan keuangannya masih saja kurang baik. Hal ini di tunjukkan dengan adanya: (1) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. (2) masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (3) *Inefisiensi* pemerintah daerah dalam penggunaan keuangan daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Pengukuran Kinerja Keuangan juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa

uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Dasar uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEVALUASI PENGELOLAAN APBD (STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PERIODE 2014-2017)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari Rasio Pertumbuhan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari Rasio Pertumbuhan.

2. Kegunaan

Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan berguna, antara lain:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Praktis

1) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

4) Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut KBBI, (1990). Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis dalam penelitian ini yaitu bentuk analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Kinerja Keuangan

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mahsun, 2016). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Ada beberapa ukuran kinerja untuk mengukur kinerja keuangan, penulis menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan serta rasio pertumbuhan.

3. Pemerintah Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Adapun pemerintah daerah yang dimaksud penulis ialah pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (KBBI, 1990). Pengelolaan yang dimaksud penulis ialah pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di wujudkan dalam APBD tahun anggaran 2014-2017.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran (Mahsun, 2016). Dengan demikian, APBD yang dimaksud penulis disini adalah anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2014-2017.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik yang mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu

informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Bahrhun Assidiqi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Klaten periode 2008-2012 dan mengetahui kinerja keuangan belanja daerah Kabupaten Klaten periode 2008-2012. Pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012.

Setelah melakukan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata diatas 100%. (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 12,13 %. (2) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 5.03% (rendah). Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 90,44%. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara

umum rasio efektivitas rata-rata 103,82% dan rasio efisiensi rata-rata 12,33%. Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0,23%.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata dibawah 100%. (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%. (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%. (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata dibawah 100%.

2. Juliani Dora, mahasiswi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014. Data ini di analisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio letergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio

efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi rendah, rasio ketergantungan daerah sangat tinggi, rasio pajak daerah sangat efisien, rasio efisiensi pajak daerah sangat efisien, rasio efisiensi belanja efisien, rasio belanja operasi terhadap belanja mendominasi pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif, rasio pertumbuhan belanja operasi, dan rasio rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif.

3. Rina Febuanti, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun 2012 dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola keuangan dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Data diolah dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio utang, dan rasio perhitungan anggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 secara garis besar berdasarkan program kegiatan pendidikan dan pelatihan cukup relatif efektif, program kerja yang mereka lakukan tercapai dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan perhitungan rasio anggaran tahun 2008, Badan Diklat menunjukkan realisasi sebesar 38%, sehingga menghasilkan 62% yang tidak terealisasi karena pada tahun 2008 ada program yang tidak dilakukan secara efektif yaitu program peningkatan sarana dan prasarana. Tahun 2009 realisasi kegiatan yang dilakukan sebesar 86%, berdasarkan program dan kegiatan ada selisih 14% dikarenakan ada beberapa program yang tidak dapat dilakukan secara efektif dalam kegiatannya yaitu kegiatan penyusunan, penilaian dan evaluasi angka kredit pejabat fungsional/widyaiswara. Untuk tahun 2010 pencapaian realisasi sebesar 89% dengan selisih realisasi sebesar 11% dikarenakan ada program yang tidak dilakukan secara efektif yaitu program untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.

4. Puput Risky Pramita, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013 dilihat dari: (1) Rasio

Efektifitas PAD, (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (3) Rasio Keserasian, (4) Rasio Pertumbuhan, dan (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%.

Dari empat hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena peneliti fokus pada analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pertumbuhan dengan objek penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dimana pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah beserta alasan untuk judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika pembahasan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang diambil dari referensi seperti buku-buku, jurnal, internet maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan analisis data dan laporan penelitian, yang dimana dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan/instansi dan hasil analisis data beserta pembahasannya.

Bab V merupakan bab penutup, dimana penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan apabila perlu penulis memberikan beberapa saran demi kebaikan dan kemajuan instansi maupun bagi peneliti selanjutnya.